



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kontribusi Kebijakan *Pivot to Asia* Amerika Serikat
terhadap Hubungan Ekonomi antara Amerika Serikat
dengan Myanmar Tahun 2011-2016**

Skripsi

Oleh

Cindytia Fitriani Rahardjo

2013330033

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kontribusi Kebijakan *Pivot to Asia* Amerika Serikat
terhadap Hubungan Ekonomi antara Amerika Serikat
dengan Myanmar Tahun 2011-2016**

Skripsi

Oleh

Cindytia Fitriani Rahardjo

2013330033

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Cindytia Fitriani Rahardjo
Nomor Pokok : 2013330033
Judul : Kontribusi Kebijakan *Pivot to Asia* Amerika Serikat terhadap Hubungan Ekonomi antara Amerika Serikat dengan Myanmar Tahun 2011-2016



Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 17 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A.

:

Sekretaris

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

:

Anggota

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cindytia Fitriani Rahardjo

NPM : 2013330033

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kontribusi Kebijakan *Pivot to Asia* Amerika Serikat terhadap Hubungan Ekonomi antara Amerika Serikat dengan Myanmar Tahun 2011-2016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 1 Juli 2017



Cindytia Fitriani Rahardjo

ABSTRAK

Nama: Cindytia Fitriani Rahardjo

NPM: 2013330033

Judul: Kontribusi *Pivot to Asia* Amerika Serikat terhadap Hubungan Ekonomi antara Amerika Serikat dengan Myanmar Tahun 2011-2016

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu menarik perhatian dunia internasional. Tanpa terkecuali, kebijakan *Pivot to Asia*. Kebijakan yang merubah arah kepentingan AS ke Asia Pasifik ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan AS dengan negara-negara di Asia Pasifik, termasuk dalam sektor ekonomi. *Pivot to Asia* telah diimplementasikan hampir kepada seluruh negara di Asia, termasuk Myanmar. Secara spesifik, penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana kontribusi yang diberikan *Pivot to Asia* terhadap hubungan ekonomi antara AS dengan Myanmar. Fenomena ini dipilih mengingat AS dan Myanmar sebelumnya tidak memiliki hubungan ekonomi yang dekat antara satu sama lain. Maka dari itu, penelitian ini akan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam hubungan ekonomi AS dengan Myanmar pasca adanya *Pivot to Asia*.

Konsep kebijakan luar negeri dan *compatibility perspective*, digunakan untuk membantu melihat bagaimana kontribusi kebijakan *Pivot to Asia* terhadap hubungan ekonomi antara AS dengan Myanmar ketika kebijakan tersebut berlaku, yaitu tahun 2011-2016. Selain itu, penelitian ini juga mengukur indeks demokrasi Myanmar karena Myanmar sedang dalam proses untuk berubah menjadi lebih demokratis. Tidak dapat dipungkiri, Myanmar yang semakin demokratis semakin membuka peluang bagi AS untuk mengimplementasikan *Pivot to Asia* di Myanmar. Inilah yang membuat demokrasi di Myanmar tidak bisa diacuhkan. Kebijakan *Pivot to Asia* tersebut menghasilkan peningkatan hubungan ekonomi antara AS dengan Myanmar dalam berbagai bidang, yaitu perjanjian perdagangan, ekspor dan impor, investasi, dan bantuan ekonomi.

Kata kunci: *Pivot to Asia* Amerika Serikat, Demokrasi di Myanmar, Perjanjian Perdagangan, Ekspor dan Impor, Investasi, Bantuan Ekonomi

ABSTRACT

Name: Cindytia Fitriani Rahardjo

NPM: 2013330033

Judul: Pivot to Asia's Contribution toward United States and Myanmar Economic Relations in 2011-2016

United States foreign policy always attracts world's attention. It also happens to U.S. Pivot to Asia. The foreign policy that changed U.S. interests to Asia Pacific was made to improve U.S. relations with Asia Pacific countries. It was also aimed to improve economic relations with them. Pivot to Asia has been implemented to almost all countries in Asia, including Myanmar. Specifically, this study will explain how Pivot to Asia contributes to economic relations between U.S. and Myanmar. This case is chosen based on the fact that U.S. and Myanmar are not closely enough in terms of economic relations between each other. Therefore, this study will explain the changes that occur in U.S. economic relations with Myanmar after the Pivot to Asia was born.

Foreign policy concept and compatibility perspective are used to explain how U.S. Pivot to Asia contribute to economic relations between U.S. and Myanmar when the policy take action, which is in 2011-2016. In addition, this study also measures Myanmar's democracy index because Myanmar still in the process to become more democratic. It is undeniable that improvement of democracy in Myanmar has opened the opportunities for U.S. to implement its policy in Myanmar which makes this subject cannot be ignored. Pivot to Asia generate an improved economic ties between U.S. and Myanmar in terms of trade agreement, export and import, investment, and economic assistance.

Keywords: U.S. Pivot to Asia, Democracy in Myanmar, Trade Agreement, Export and Import, Investment, Economic Assistance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul, “**Kontribusi Kebijakan *Pivot to Asia* Amerika Serikat terhadap Hubungan Ekonomi antara Amerika Serikat dengan Myanmar Tahun 2011-2016**” tepat pada waktunya.

Kebijakan luar negeri AS pada tahun 2011-2016, yaitu *Pivot to Asia*, sedikit banyak mempengaruhi bagaimana hubungan AS dengan negara-negara lain di Asia, baik dalam sektor ekonomi, keamanan, teknologi informasi, sosial, budaya dan masih banyak lagi. Kebijakan *Pivot to Asia* yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional AS melalui interaksi dan kerja sama ini secara langsung meningkatkan hubungannya dengan negara-negara lain di wilayah Asia, termasuk dengan Myanmar. Itulah yang akan dibahas oleh penulis di dalam tulisan ini. Secara lebih mendalam, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana *Pivot to Asia* berkontribusi terhadap hubungan AS dengan Myanmar, khususnya dalam bidang ekonomi di kurun waktu dimana kebijakan *Pivot to Asia* berlaku.

Penulis menyadari bahwa penelitian yang diajukan sebagai syarat kelulusan Program Strata-1 Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan ini, masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengapresiasi segala bentuk kritik serta saran yang membangun sebagai masukan guna melengkapi maupun memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Penulis pun berharap agar

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik sebagai referensi atau acuan, terlebih bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional.

Bandung, 1 Juli 2017

Cindytia Fitriani Rahardjo

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga skripsi saya yang berjudul “**Kontribusi Kebijakan *Pivot to Asia* Amerika Serikat terhadap Hubungan Ekonomi antara Amerika Serikat dengan Myanmar Tahun 2011-2016**” dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan. Banyak pihak-pihak lain yang membantu dan mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mengambil peranan penting selama proses pengerjaan skripsi ini maupun selama saya berkuliah di jurusan hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan.

Pertama, terima kasih kepada Mama, Papa, dan Ade yang selalu mendukung tete dalam pengerjaan skripsi. Terima kasih Ma atas segala bentuk toleransi dan kesabaran saat tete mengerjakan skripsi, terima kasih Pa atas doa dan pengertiannya dan terima kasih De untuk tidak banyak merepotkan selama tete mengerjakan skripsi.

Kedua, terima kasih kepada Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan dan Mbak Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih kepada Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. selaku pembimbing skripsi. Bertemu Mas Irawan setiap hari Rabu setiap minggu selalu memacu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan sebaik mungkin dan tepat waktu, jadi terima kasih Mas. Terima kasih kepada Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A. dan Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A. yang menjadi penguji dalam sidang skripsi saya. Tanpa saran dan masukan dari mas-mas sekalian, skripsi saya tidak akan menjadi skripsi yang seutuhnya. Terima kasih juga kepada Albert Triwibowo, S.IP., M.A. dan P.Y. Nur Indro, S.IP., M.A. yang membantu dalam merumuskan dan menyelesaikan skripsi ini walaupun keduanya bukanlah dosen pembimbing saya. Keisengan dan bercandaan mas-mas sekalian tidak akan pernah saya lupa. Tidak

lupa, terima kasih kepada seluruh dosen, tata usaha, dan pekarya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Ketiga, terima kasih kepada keluarga terdekat Aki, Enin, Eyang Putri, Eyang Kakung, Pade, Bude, Ua, Om, Tante, sepupu dan saudara-saudara yang selalu mendoakan. Saya percaya, tanpa adanya doa-doa dari keluarga terdekat, saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi dan menjalani sidang dengan lancar.

Keempat, terima kasih kepada Denissa Rahma Adianti, Maretta Putri Vantari dan Yuli Nuranti Zubir atas kesempatannya untuk mengenal kalian dan menjadi sahabat kalian. Aku tidak pernah merasa seberuntung ini untuk memiliki orang-orang yang selalu mendukung, membantu, dan ada dalam masa-masa akhir perkuliahan ini. Kenapa ya kita ga deket dari dulu? Terima kasih untuk kesabarannya dalam menghadapi aku yang sangat tidak peka dan super cuek ini dan terima kasih lagi untuk pengertiannya atas diriku yang seperti ini. Kalian mengajarkan bahwa sesuatu yang dilakukan bersama itu sangat menyenangkan Love.

Kelima, terima kasih kepada Putimas Wirza Kahanasty, Novita Angelia, Mauren Elvyn Natasya, dan Astrid Antonia yang selalu mendukung dan memberikan saran atas bagaimana seharusnya hubungan yang baik antara aku, skripsiku, dan pemingkingku. Kalian menjadi bagian baru dalam kehidupanku. Ibaratnya hidup aku ini ayam SPG, kalianlah surundengnya. Terima kasih atas kebersamaannya, leluconnya, air matanya, dan kebahagiaannya. Love.

Keenam, terima kasih kepada Gayatri Grace, Veronika Aginta, Jessica Puspitasari, Yulfitri Pramatya, Dion Aditya, dan Bayu Prakoso yang selalu mendukung dan menjadi *partner in crime* dalam pengerjaan skripsi. Saran, masukan dan perdebatan yang kita alami selama pengerjaan skripsi sangat membangun loh, jadi terima kasih banyak!

Ketujuh, terima kasih kepada geng SMA-ku, Anis, Ape, Ns, Emak, dan Alisa yang telah menjadi saksi kehidupan SMA dan kuliahku selama ini. Hidupku tak akan sama tanpa kalian. Terima kasih juga telah ada dan menyempatkan diri untuk menemani dan mendukung pengerjaan skripsiku. Love.

Kedelapan, terima kasih kepada Arin, Erika, Agnes dan Billy yang selalu menjadi teman sepenanggungan dalam menunggu kedatangan dosen pembimbing tercinta. Terima kasih atas waktu, obrolan, dan motivasinya selama pengerjaan skripsi. See you on top!

Kesembilan, terima kasih kepada teman-teman Co-op Space, Angga, Wawa, Acung, Andrian, Ka Molly, Ka Eki, Bajik, Egi, kaka-kaka dan mas-mas semuanya yang aku tidak bisa sebutkan satu-persatu. Dukungan kalian sangat berarti loh, jadi terima kasih!

Kesepuluh, terima kasih kepada Purusadhikara dan Muhammad Andika yang menjadi penyemangat dan penghibur selama aku mengerjakan skripsi. Maafkan aku lulus duluan.

Kesebelas, terima kasih kepada Starbucks, Cultivar, Contrast dan Warjan 11 yang menjadi tempat dan saksi bisu dalam pengerjaan skripsiku. Terima kasih atas kopinya, makanannya dan yang paling utama, wi-finya.

Terakhir, terima kasih kepada semua orang yang mengenalku dan membantuku dalam hal apapun selama ini. Maaf tidak bisa menyebutkan nama kalian satu-persatu. Bukan tak ingin, tapi aneh rasanya jika ucapan terima kasih akan lebih panjang daripada skripsi itu sendiri. *So many people helped me and supported me all this time!* Kalian semua sangat berarti dan berpartisipasi dalam membentuk pribadiku yang seperti ini. *I can't thank you guys enough.* Untuk para pembaca, terima kasih! Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua~

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.1 Metode Penelitian	17
1.6.2 Jenis Penelitian	18
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7 Sistematika Pembahasan	19
BAB II PIVOT TO ASIA (2011-2016)	21
2.1 Definisi Kebijakan <i>Pivot to Asia</i>	21
2.2 Strategi dan Tujuan Kebijakan <i>Pivot to Asia</i>	25
2.3 Hubungan <i>Pivot to Asia</i> dan Negara-Negara Asia Pasifik.....	29
BAB III DEMOKRASI DI MYANMAR.....	42
3.1 Myanmar Masa Rezim Militer (1962-1988)	43
3.1.1 Embargo Ekonomi	47

3.2 Myanmar Masa Perubahan Menuju Demokrasi (1990-2016).....	50
3.3 Demokrasi di Myanmar.....	60
3.3.1 Proses Pemilihan dan Pluralisme.....	62
3.3.2 Fungsi Pemerintahan.....	64
3.3.3 Partisipasi Politik.....	65
3.3.4 Budaya Politik.....	65
3.3.5 Kebebasan Sipil.....	67
BAB IV EVALUASI HUBUNGAN EKONOMI AS DENGAN MYANMAR	
TAHUN 2010-2016.....	70
4.1 Hubungan Ekonomi AS-Myanmar Sebelum Adanya <i>Pivot to Asia</i>	71
4.2 Kontribusi Kebijakan <i>Pivot to Asia</i> terhadap Hubungan Ekonomi AS dengan Myanmar.....	74
4.2.1 Trade Investment and Framework Agreement (TIFA).....	79
4.2.2 Ekspor dan Impor.....	83
4.2.3 Investasi.....	86
4.2.4 Bantuan Ekonomi.....	88
BAB V KESIMPULAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 2.1	Tabel Posisi Negara-negara di Asis Pasifik terhadap Kebijakan <i>Rebalance</i> Amerika Serikat	29
Tabel 3.1	Tabel Indeks Demokrasi Myanmar	60
Tabel 3.2	Tabel Survey Opini Publik Masyarakat Myanmar atas Aspek-aspek Demokrasi 2013-2014	66
Tabel 4.1	Tabel Total Ekspor dan Impor Produk AS ke/dari Myanmar.....	83
Tabel 4.2	Tabel Total Ekspor dan Impor Produk Myanmar ke/dari AS.....	83
Tabel 4.3	Tabel Total Investasi Asing per Tahun AS yang Disetujui oleh Myanmar.....	87
Table 4.4	Tabel Bantuan Ekonomi AS ke Myanmar (dalam satuan juta dolar)	91
Grafik 4.1	Grafik Total Bantuan Ekonomi AS ke Myanmar tahun 2010-2016	92

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nation</i>
EDCA	: <i>Enhanced Defense Cooperation Agreement</i>
IDE	: <i>Institute of Developing Economics</i>
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
JADE	: <i>Junta's Anti-Democratic Efforts</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NLD	: <i>National League for Democracy</i>
SLORC	: <i>State Law and Order Restoration Council</i>
SPDC	: <i>State Peace and Development Council</i>
TCTP	: <i>Third Country Training Program</i>
TIFA	: <i>Trade Investment and Framework Agreements</i>
US	: <i>Unites States</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
USDP	: <i>Union Solidarity and Development Party</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1	Lampiran Isi Perjanjian <i>Trade Investment and Framework Agreement</i> (TIFA)	105
--------------	--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan secara singkat fenomena yang dipilih penulis, teori yang digunakan untuk menganalisa fenomena tersebut, kajian literatur yang dapat mendukung tulisan ini, tujuan dari penelitian ini, kegunaan dari penelitian ini, metode yang digunakan dan sistematika penulisan dari tulisan ini. Penjelasan atas hal-hal diatas terbagi menjadi tujuh sub bab yang berbeda agar pembaca dapat dengan mudah mengerti dan memahami hal tersebut.

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang ada di dunia pasti akan berinteraksi dengan negara lain. Interaksi tersebut merupakan sebuah perwujudan dari keharusan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan suatu negara yang mencakup sektor ekonomi, keamanan, teknologi informasi, sosial bahkan budaya, tidak bisa dipenuhi semata-mata oleh negara itu sendiri.

Interaksi untuk pemenuhan kebutuhan negara tersebut diatur dan diwujudkan dengan adanya kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain dan dibentuk untuk memenuhi tujuan nasional negara tersebut.¹ Kebijakan ini dibentuk oleh pemerintahan suatu negara dan dapat berubah-ubah seiring dengan berubahnya pemimpin negara tersebut. Berhasil atau

¹ "Foreign policy," *Dictionary.com*, diakses pada 6 Oktober 2016 dari <https://dictionary.com/browse/foreign-policy>.

tidaknya pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara akan menentukan apakah kebutuhan suatu negara tersebut dapat terpenuhi dengan baik atau tidak. Maka dari itu, kebijakan luar negeri merupakan salah satu elemen penting dalam kelangsungan hidup suatu negara.

Kebijakan luar negeri suatu negara dapat mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, sosial budaya, teknologi informasi dan masih banyak lagi. Contohnya, dalam bidang ekonomi kebijakan luar negeri bertujuan untuk mengembangkan dan membangun kerja sama ekonomi yang akan berkontribusi dalam menjamin kemakmuran dan keamanan nasional suatu negara.² Kerjasama ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui perdagangan, ekspor dan impor, investasi, bantuan ekonomi, perjanjian ekonomi, pasar bebas, dan lain-lain.

Amerika Serikat (AS) adalah salah satu negara yang melakukan kerja sama ekonomi dengan seluruh pelosok dunia. Ia memiliki hubungan ekonomi dengan lebih dari 75 negara yang tersebar di Asia, Eropa, Amerika Selatan, Timur Tengah dan Pasifik.³ Hubungan ekonomi tersebut dilakukan AS sebagai salah satu usahanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya sendiri. Ini merupakan salah satu contoh implementasi dari kebijakan luar negeri AS dalam sektor ekonomi.

Sebagai salah satu negara besar dan memiliki pengaruh di dunia internasional, kebijakan luar negeri AS selalu menarik perhatian masyarakat dunia. Kebijakan luar negeri AS seringkali melibatkan banyak negara dan

² Ernest Petri , *Foreign Policy: From Conception to Diplomatic Practice* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 173.

³ "Countries and Regions," *Office of the United States Trade Representatives*, diakses pada 6 Oktober 2016 dari <https://ustr.gov/countries-regions>.

mencakup segala macam bidang. Baik ekspor dan impor, investasi, bantuan ekonomi, dan perjanjian bilateral, dilakukan AS sebagai realisasi dari kebijakan luar negeri AS. Itu dilakukannya terhadap seluruh dunia, termasuk Asia. Asia, sebagai benua dengan wilayah terluas di dunia sebesar 44.391.162 km² dan populasi terbanyak di dunia yaitu 4.055.000.000 jiwa⁴ menawarkan pasar dengan peluang yang luar biasa bagi AS. Asia yang merupakan wilayah dinamis akibat dari banyaknya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang seperti Singapura, Korea Selatan, India, Indonesia, akhirnya menjadi sasaran dari kebijakan luar negeri AS.

Hubungan ekonomi yang dilakukan AS ini tidaklah semata-mata melihat fakta bahwa Asia adalah pasar yang menguntungkan karena luas dan populasinya, namun juga melihat situasi dan kondisi politik dari negara dan wilayah tersebut. Sebagai sebuah negara yang akan melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain, setidaknya situasi politik domestik di negara atau wilayah tersebut harus terjamin. Salah satu indikator yang digunakan AS dalam menilai terjamin atau tidaknya hubungan ekonomi mereka dengan suatu negara adalah demokrasi. AS yang terkenal sebagai negara pelopor demokrasi, tentu mengharapkan negara yang nantinya akan bekerja sama dengannya setidaknya memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama.

Pada umumnya, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila sistem pemerintahan di dalam negara tersebut dicirikan dengan adanya pemilihan secara berkala untuk penguasa, partai politik yang kompetitif, hak-hak

⁴ Matt Rosenberg, "Ranking of Continents by Area and Size," *About Education*, diakses pada 7 Oktober 2016 dari <http://geography.about.com/od/lists/a/largecontinent.htm>.

yang mendekati hak universal, pemungutan suara secara rahasia, serta penghormatan untuk kebebasan sipil dan hak politik (atau hak-hak asasi manusia umum).⁵ Namun secara lebih spesifik, demokratis atau tidaknya sebuah negara juga dapat diukur melalui indeks demokrasi. Indeks demokrasi tersebut melibatkan pengukuran bagaimana proses pemilihan dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik dan budaya politik di suatu negara.⁶

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagai salah satu negara di ASEAN, Myanmar merupakan negara dengan dinamika politik dan ekonomi yang menarik dan saling berkesinambungan. Sistem politik mereka yang terkenal karena sebelumnya dikuasai penuh oleh militer, membuat situasi politik dan ekonomi Myanmar terpuruk. Namun sekarang ini, perekonomian Myanmar terus berkembang hingga berada di posisi ke-70 dunia dalam besaran GDP dengan total \$64,866 juta pada tahun 2015.⁷ Ini merupakan kemajuan besar melihat bahwa perekonomian Myanmar baru bereformasi dan terbuka untuk pasar dunia pada pertengahan tahun 1990.⁸

Adanya perubahan tersebut merupakan salah satu usaha Myanmar untuk berubah menjadi negara demokratis. Perubahan tersebut dimulai ketika pada tahun 1990 partai oposisi Myanmar *National League for Democracy* (NLD) memenangi

⁵ Martin Griffiths, Terry O'Callaghan dan Steven C. Roach, *International Relations: The Key Concepts Second Edition* (New York: Routledge, 2008), 66.

⁶ Economist Intelligence Unit, *Democracy index 2010; Democracy in retreat* (A report from the Economist Intelligence Unit), (London: The Economist Intelligence Unit, 2010), 28-29.

⁷ "GDP Ranking," *The World Bank*, diakses pada 17 Oktober 2016 dari <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table>.

⁸ "Economic History of Myanmar," *Facts and Details*, diakses pada 17 Oktober 2016 dari http://factsanddetails.com/southeast-asia/Myanmar/sub5_5g/entry-3126.html#chapter-13.

pemilu.⁹ Ini menjadi titik awal bagi perubahan Myanmar menuju demokrasi. Walaupun perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan karena sistem ekonomi, pasar, dan investasi asing masih sangat diatur oleh pihak militer yang memegang kekuasaan penuh di Myanmar¹⁰, itu merupakan titik awal perubahan Myanmar menuju demokrasi.

Semenjak saat itu, perekonomian Myanmar perlahan-lahan menemukan alurnya dan terus meningkat. Adanya reformasi pasar di Myanmar yang menjadi lebih terbuka dan munculnya peran signifikan dari NLD dalam sistem pemerintahan Myanmar membuat banyak negara-negara demokrasi menjadi tertarik untuk mulai melakukan kerjasama ekonomi dengan Myanmar. Salah satunya adalah AS. Pada tahun 2011, AS mengeluarkan kebijakan *Pivot to Asia* atau *Rebalance* yang memiliki prioritas untuk memperkuat kerja sama dengan partner-partner AS di Asia, memanfaatkan kepentingan dan kapabilitas negara-negara di Asia untuk membangun jaringan bersama yang sependapat, memperkuat aturan berbasis regional dan membahas tantangan global.¹¹ Kebijakan ini membuat AS menjadikan Asia sebagai kawasan tujuan pemenuhan kepentingan nasional mereka kedepannya. Ini membuat AS dapat mempererat hubungan dengan negara-negara di Asia. Menariknya, kebijakan ini juga berlaku bagi negara-negara yang tidak terlalu sepaham dengan pemikiran dan pemahaman AS seperti demokrasi dan liberal.

⁹ "Myanmar profile – Timeline," *BBC News*, diakses pada 17 Oktober 2016 dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12992883>.

¹⁰ "Economic History of Myanmar", *Loc. Cit.*

¹¹ "FACT SHEET: Advancing the Rebalance to Asia and the Pacific," *The White House*, diakses pada 17 Oktober 2016 dari <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/11/16/fact-sheet-advancing-rebalance-asia-and-pacific>.

Myanmar bukanlah negara demokratis. Walaupun semakin hari Myanmar semakin demokratis, namun Myanmar belum dapat dikategorikan sebagai negara demokratis.¹² Akan tetapi, adanya perubahan Myanmar untuk menjadi lebih demokratis membuka jalan bagi AS untuk dapat mendekatkan hubungan dengan Myanmar melalui *Pivot to Asia*. Pendekatan hubungan tersebut diwujudkan dalam peningkatan hubungan ekonomi antara kedua negara. Hubungan ekonomi antara AS dan Myanmar yang sebelumnya terbatas hanya pada pemberian sanksi ekonomi, bantuan ekonomi, investasi dan kegiatan ekspor impor dalam jumlah yang relatif kecil, dapat mengalami peningkatan dan perluasan yang cukup signifikan setelah adanya *Pivot to Asia*. Bahkan, dapat terlahir perjanjian bilateral dalam bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara pasca *Pivot to Asia*.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan atas identifikasi masalah diatas, tulisan ini akan dibatasi pada kontribusi dari adanya kebijakan *Pivot to Asia* milik AS terhadap hubungan ekonomi antara AS dengan Myanmar. Untuk memperjelas, penulis akan membatasi pembahasan makalah ini dengan pembatasan aspek, aktor dan waktu. Aspek yang akan dijelaskan di dalam makalah ini dibatasi pada hubungan ekonomi –ekspor dan impor, perjanjian perdagangan, investasi dan bantuan ekonomi– antara AS dengan Myanmar. Aktor yang akan dibahas adalah AS dan Myanmar. Waktu yang akan digunakan dalam pembahasan makalah ini pun dibatasi yaitu pada tahun 2011-2016.

¹² Economist Intelligence Unit, *Democracy index 2016; Revenge of the “deplorables”* (A report from the Economist Intelligence Unit), (London: The Economist Intelligence Unit, 2017), 10.

Selain itu, penjelasan atas aktor –Myanmar dan AS– akan dibatasi. Terkait Myanmar, penulis hanya akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan sistem pemerintahan Myanmar, prosesnya menuju demokrasi, apa-apa yang dihasilkan dari perubahan tersebut dan seberapa demokratis-kah Myanmar menurut perhitungan yang penulis ambil dari *Economist Intelligence Unit*. Terkait AS, penulis hanya akan menjelaskan mengenai kebijakan *Pivot to Asia* dan hubungannya dengan negara-negara di Asia Pasifik. Pembatasan tersebut dilakukan agar tulisan ini terfokus untuk melihat perubahan yang dialami atau dilakukan oleh aktor-aktor diatas dan apa kontribusi perubahan tersebut terhadap hubungan ekonomi satu sama lain.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan bahwa pertanyaan penelitian dari tulisan ini adalah “Bagaimana kontribusi kebijakan *Pivot to Asia* AS terhadap hubungan ekonomi antara AS dengan Myanmar pada tahun 2011-2016?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian digunakan untuk menjelaskan apa-apa saja yang menjadi objektifitas penulis atas disusunnya tulisan ini. Maka dari itu, di bawah ini akan dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian dari tulisan ini.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi dari adanya kebijakan *Pivot to Asia* AS terhadap hubungan ekonomi antara AS dengan Myanmar pada tahun 2011-2016. Dalam proses penelitian ini akan terlihat bagaimana kebijakan suatu negara dapat memberikan perubahan situasi dan kondisi domestik negara lain.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan *Pivot to Asia* milik AS dan hubungannya dengan hubungan ekonomi antara AS dan Myanmar. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan isu-isu serupa di dalam Ilmu Hubungan Internasional.

1.4 Kajian Literatur

Tulisan ini dibuat dengan menggunakan beberapa sumber yang menurut penulis dapat mendukung dan menjadi sumber dalam pembuatan dan penyelesaian tulisan ini. Sumber-sumber tersebut antara lain,

- Jurnal dari *Chatham House*, dengan judul *Explaining the US 'Pivot' to Asia* yang ditulis oleh Kurt Campbell dan Brian Andrews pada bulan Agustus 2013.

Jurnal ini memuat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan *Pivot to Asia* AS secara singkat. Dalam jurnal ini, terdapat juga

penjelasan mengenai apa-apa saja prioritas yang diusung oleh AS melalui kebijakan *Pivot to Asia* tersebut beserta contoh-contohnya.¹³ Jurnal ini merupakan referensi awal yang sangat mendukung penulis untuk mengerti seperti apakah *Pivot to Asia* dan apa saja strategi kebijakan tersebut terhadap negara-negara di Asia Pasifik.

- *Council on Foreign Relations Working Paper* dengan judul *The Pivot in Southeast Asia; Balancing Interests and Values* yang ditulis oleh Joshua Kurlantzick pada Januari 2015.

Working Paper ini menjelaskan bagaimana kebijakan *Pivot to Asia* dalam praktiknya langsung di Asia. Tulisan ini menjelaskan secara mendetil bagaimana pendekatan AS pada negara-negara di Asia Tenggara seperti Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Thailand dan Myanmar yang notebenanya bukanlah negara yang memiliki hubungan dekat dengan AS. Alasan-alasan mengapa AS mendekati diri dengan negara-negara tersebut juga dijelaskan di dalam tulisan ini. Lebih jauh lagi, tulisan ini juga menjelaskan kegagalan-kegagalan yang dialami AS serta memberikan rekomendasi bagi AS atas implementasi *Pivot to Asia* kepada negara-negara yang telah disebutkan diatas.¹⁴ Bagi penulis, tulisan ini menjelaskan bagaimana AS melihat hubungannya dengan Myanmar dan bagaimana hubungan tersebut kedepannya. Hal ini sangat membantu

¹³ Kurt Campbell dan Brian Andrews, "Explaining the US 'Pivot' to Asia," *Journal of Chatham House*, no. 01 (2013): 2-3.

¹⁴ Joshua Kurlantzick, "The Pivot in Southeast Asia; Balancing Interests and Values," *Working Paper Council on Foreign Relations* (2015): 3-25.

penulis untuk menganalisis bagaimana sebetulnya hubungan AS dengan Myanmar pasca adanya *Pivot to Asia*.

- *The United States Studies Centre Journal* dengan judul *Myanmar and the United States: Prospects for a Limited Security Partnership* ditulis oleh Dr J rgen Haacke pada tahun 2015.

Jurnal ini menjelaskan bagaimana Myanmar menghadapi ancaman internal maupun eksternal, tantangan dan kemungkinan Myanmar semenjak adanya perubahan sistem pemerintahan mereka.¹⁵ Tidak hanya itu, jurnal ini juga memuat penjelasan mengenai hubungan bilateral antara Myanmar dengan AS dalam bidang ekonomi, keamanan, tantangan dan peluang bagi hubungan keduanya kedepannya juga kemungkinan hubungan keduanya kedepannya.¹⁶ Sebagai sebuah tulisan yang akan menjelaskan hubungan antara AS dengan Myanmar, jurnal ini merupakan referensi yang sangat membantu penulis dalam mengerjakan tulisan ini.

Ketiga jurnal diatas digunakan oleh penulis sebagai acuan dan pembanding dalam menyelesaikan tulisan ini. Namun berdasarkan isi jurnal dan *paper* tersebut, belum ada yang secara khusus membahas bagaimana kebijakan AS berkontribusi terhadap hubungan ekonomi dengan Myanmar. Maka dari itu, tulisan ini akan difokuskan pada pembahasan kontribusi kebijakan *Pivot to Asia* AS terhadap hubungan ekonomi antara AS dengan Myanmar.

¹⁵ Dr J rgen Haacke, "Myanmar and the United States: Prospects for a Limited Security Partnership," *The United States Studies Centre* (2015): 4.

¹⁶ *Ibid.*, Hal 18-25.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menjelaskan fenomena-fenomena hubungan internasional, dibutuhkan pemikiran-pemikiran para ahli hubungan internasional. Salah satu pemikiran yang terkenal akan optimismenya dalam melihat hubungan internasional adalah liberalisme. Liberalisme mengemukakan bahwa dibalik sistem internasional yang anarki dan sifat manusia yang egois, keinginan mereka dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama yang akan membawa hasil luar biasa bagi diri mereka maupun orang lain.¹⁷

Liberalisme memahami nilai dan pentingnya kerja sama sehingga liberalisme memiliki visi untuk mewujudkan kerja sama tanpa terkecuali bagi seluruh umat manusia di dunia.¹⁸ Menurut liberalisme, kerja sama yang dilakukan oleh suatu negara akan sejalan dengan kepentingan mereka. Seperti perjanjian perdagangan atau pertukaran budaya yang merupakan contoh dari kerja sama yang menurut liberalisme akan menguntungkan negara tersebut.¹⁹

Kerja sama dengan negara lain merupakan salah satu implementasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri merupakan usaha yang menjadi acuan pemerintahan suatu negara dalam menentukan sikap dan pilihan atas hubungannya dengan negara lain.²⁰ Kebijakan ini dibentuk dari kepentingan nasional sebuah negara.²¹ Maka dari itu, kebijakan luar negeri digunakan sebagai

¹⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (New York: Oxford University Press, 2010), 96.

¹⁸ Ludwig von Mises, *Liberalism in the Classical Tradition* (Virginia: The Foundation for Economic Education, Inc, 1985), 105.

¹⁹ Juliet Kaarbo, Jeffrey S.Lantis, dan Ryan K. Beasley, *The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective* (Washington, D.C.: CQ Press, 2002), 11.

²⁰ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Op. Cit.*, 226.

²¹ *Ibid*, hal 228.

suatu cara untuk menjaga kepentingan nasional suatu negara melalui diplomasi maupun kerja sama.²²

Dalam bekerja sama dengan negara lain, setiap negara pasti akan melihat kesamaan maupun kesepahaman pemikiran dan pandangannya dengan negara lain. Kesamaan dan kesepahaman tersebut sangat penting agar kerja sama yang dibangun dapat berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah bagaimana negara demokrasi cenderung akan bekerja sama dengan negara demokrasi pula.²³ Maka dari itu, demokrasi dapat dilihat sebagai salah satu kriteria suatu negara untuk dapat bekerja sama dengan negara lain.

Untuk menentukan apakah sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis atau tidak dalam tulisan ini, penulis menggunakan pengukuran dari *Economist Intelligence Unit*. Penulis memilih pengukuran ini karena *Economist Intelligence Unit* mengukur indeks demokrasi suatu negara melalui 60 pertanyaan spesifik yang lebih mencakup aspek-aspek demokrasi suatu negara dibandingkan pengukuran lainnya.²⁴ Aspek-aspek tersebut antara lain proses pemilihan dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik dan budaya politik.²⁵ Penjelasan secara mendetil mengenai aspek tersebut ada di bawah ini.

1. Proses pemilihan dan pluralisme

²² Thomas Diez, Ingvild Bode, dan Aleksandra Fernandes da Costa, *Key Concepts in International Relations* (London: Sage, 2011), 58.

²³ Dan Reiter, "Democratic Peace Theory," *Oxford Bibliographies*, diakses pada 10 Oktober 2016 dari <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0014.xml>.

²⁴ Economist Intelligence Unit, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

Aspek ini melihat apakah suatu negara melaksanakan pemilihan umum secara bebas dan adil atau tidak.²⁶ Pemilihan umum yang demokratis haruslah memberikan kesempatan yang sama bagi para pemilih, meskipun diantara mereka ada perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Pemilihan umum juga harusnya dilakukan oleh rakyat untuk memilih pemimpinnya secara berkala, tidak melibatkan pemungutan rahasia dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun.²⁷

2. Fungsi pemerintahan

Di dalam negara demokrasi, pemerintahan sebuah negara haruslah mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang bersumber dari rakyat atau perwakilannya.²⁸ Pemerintahan tersebut haruslah dipilih langsung oleh rakyat dan terbebas dari pengaruh militer, kelompok, atau organisasi keamanan tertentu.²⁹ Fungsi pemerintahan yang demokratis juga seharusnya terbebas dari korupsi dan pemimpin yang otoriter. Jika itu terwujud, barulah pemerintahan negara tersebut dapat dikatakan berfungsi dengan baik.

3. Partisipasi politik

Negara demokrasi harus mengizinkan dan mendukung rakyatnya untuk berpartisipasi dalam politik. Partisipasi yang dimaksud bukanlah hanya sekedar mencalonkan diri menjadi bagian dari pemerintahan, namun juga ikut memilih

²⁶ Ibid, hal 29.

²⁷ Georg Sorensen, *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in A Changing World, Third Edition (Dilemmas in World Politics)*, (United States of America: Westview Press, 2007), hal 57.

²⁸ Economist Intelligence Unit, *Op.Cit.*, hal 29.

²⁹ Ibid, hal 35.

dalam pemilu, berpartisipasi dalam debat publik, dan bergabung dengan partai politik.³⁰

4. Budaya politik

Budaya politik merupakan suatu sistem nilai dan kepercayaan yang mendefinisikan konteks dan arti dari aksi politik.³¹ Ini berarti, masyarakat di dalam suatu negara mempercayai bahwa demokrasi adalah sistem yang paling baik bagi negaranya dan mereka rela menerapkan sistem tersebut di kehidupan sehari-hari. Budaya politik identik dengan masyarakat yang aktif, tidak apatis dan kritis. Budaya politik ini menjadi tahap akhir yang harus dipenuhi dari sebuah negara demokrasi setelah institusi dan praktik demokrasi berjalan dengan baik.³²

5. Kebebasan sipil

Kebebasan sipil disini mencakup kebebasan untuk berbicara, berkumpul, berekspresi, memilih agama, berpartisipasi dalam politik, mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum, memiliki sesuatu, dan lain-lain.³³ Demokrasi adalah sistem dimana masyarakatnya dibebaskan untuk memilih hal-hal yang ditentukan berdasarkan hukum mayoritas, hak asasi manusia dan hak-hak minoritas. Maka dari itu, kebebasan sipil dalam sistem demokrasi sangat dijunjung tinggi.³⁴

³⁰ Ibid, hal 30.

³¹ Georg Sorensen, *Democracy and Democratization*, hal 30.

³² Ibid, hal 53.

³³ Economist Intelligence Unit, *Op.Cit.*, hal 40-42.

³⁴ Ibid, hal 29-30.

Pengukuran aspek-aspek demokrasi diatas dilakukan dengan pemberian nilai 1-10 untuk setiap aspeknya.³⁵ Nilai tersebut didapat dari jawaban pertanyaan-pertanyaan spesifik terkait aspek tersebut. Hasil perhitungan itu kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara kedalam kelompok rezim tertentu. Klasifikasi yang dimaksud antara lain, Rezim Demokrasi Penuh (dengan skor 8-10), Rezim Demokrasi Cacat (dengan skor 6-7.9), Rezim *Hybrid* (dengan skor 4-5.9), dan Rezim Otoriter (dengan skor dibawah 4).³⁶

Di dalam sebuah negara, pertumbuhan ekonomi disinyalir berkaitan dengan pembentukan demokrasi. Asumsi-asumsi yang ada menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembentukan demokrasi dan pembentukan demokrasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Perdebatan pun muncul ketika ternyata kedua asumsi tersebut sama-sama dikritik oleh ahli dan peneliti hubungan internasional. Perdebatan tersebut sering muncul karena sulit untuk menentukan pengukuran dan pertumbuhan ekonomi dan demokrasi dari sebuah negara.

Pemikiran atas hubungan timbal balik antara ekonomi dan demokrasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu pemikiran yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara ekonomi dan demokrasi, adanya hubungan tidak langsung antara ekonomi dan demokrasi, serta tidak ada hubungan sistematis sama sekali antara ekonomi dan demokrasi.³⁷ Hubungan langsung antara ekonomi dan demokrasi terdiri dari dua perspektif. *Compatibility Perspective* yang menyatakan bahwa

³⁵ Ibid, hal 31.

³⁶ Ibid.

³⁷ Babur Wasim Arif, Farukh Nawaz Kayani, dan Umar Nawaz Kayani, "The Interrelationship between Democracy ad Economic Growth: Theories and Empirics," *Pakistan Journal of Social Science* 32, No.1 (2012): 201.

demokrasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan level demokrasi, dan *Conflict Perspective* yang menyatakan bahwa demokrasi menghalangi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menghambat demokrasi.³⁸ Disini, penulis akan menggunakan *Compatibility Perspective* untuk membantu menjelaskan permasalahan yang ada dalam tulisan ini.

Secara spesifik, penulis menggunakan *Compatibility Perspective* yang menyatakan demokrasi mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.³⁹ Pemerintahan yang demokratis akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan perluasan partisipasi negara tersebut dalam sektor ekonomi. Ini bisa terjadi karena rakyat yang demokratis akan memperluas pasar dan mendukung pasar bebas akibat dari keinginannya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah juga murah terhadap barang dan jasa.⁴⁰ Dengan kata lain, meningkatnya level demokrasi di sebuah negara –biasanya negara yang dipimpin oleh seorang diktator– cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ini disebabkan oleh berkurangnya campur tangan pemerintah atas jalannya perekonomian yang ada di negara tersebut.⁴¹

Pandangan ini mengklaim bahwa demokrasi memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan beberapa peneliti membuktikan bahwa di

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Indra de Soysa, *Foreign Direct Investment, Democracy, and Development: Assessing contours, correlates, and concomitants of globalization* (London: Routledge, 2003), 74.

⁴¹ Robert J. Barro, "Determinants of Democracy," *Journal of Political Economy* 107 (S6): 159, diakses dari https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3451297/barro_determinantsdemocracy.pdf?sequence=2.

negara-negara kurang berkembang, rezim pemerintahan yang demokratis cocok dan sangat sesuai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Argumen ini didasarkan pada logika bahwa proses demokrasi sebuah negara melibatkan keberadaan dan keterlibatan hak-hak sipil dan politik yang menciptakan keadaan sosial yang lebih kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, para peneliti mengklaim bahwa pemerintahan demokratis di sebuah negara lebih mendukung pelaksanaan perekonomian negara tersebut dengan baik dibandingkan pengaturan politik lain.⁴² Kebebasan politik dan ekonomi yang disediakan oleh pemerintahan demokrasi secara langsung meningkatkan kompetisi pasar, yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁴³

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dan teknik pengumpulan data digunakan di dalam tulisan ini untuk mempermudah penulis dalam menjelaskan fenomena yang ada. Maka dari itu, dibawah ini penulis akan menjelaskan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini.

1.6.1 Metode Penelitian

Untuk memahami fenomena dalam tulisan ini, penulis memilih penggunaan metode penelitian kualitatif yang menekankan pendekatan induktif dalam hubungan antara teori dan penelitian juga penekanan atas penggunaan kata-kata dalam pengumpulan dan analisis data untuk dapat memahami fenomena

⁴² Babur Wasim Arif, Farukh Nawaz Kayani, dan Umar Nawaz Kayani, *Loc. Cit.*

⁴³ *Ibid*, hal 202.

sosial, menyusunnya dan melaporkannya secara terperinci dalam sebuah latar ilmiah.⁴⁴ Metode penelitian kualitatif bercirikan sebagai berikut; terfokus pada proses dan pemahaman, menjadikan penulis sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, merupakan suatu proses induktif –dimana peneliti mengumpulkan data untuk membangun konsep, hipotesis dan teori– dan menggunakan kata-kata dan gambar dibandingkan dengan angka untuk menyampaikan fenomena.⁴⁵

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk secara cermat menjelaskan karakteristik dari fenomena yang sedang diteliti dan berfokus pada jawaban atas pertanyaan “bagaimana” dengan memperoleh dan menyampaikan fakta-fakta secara jelas, lengkap dan teliti.⁴⁶

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Tulisan ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber. Sebagai bagian dari data primer dan sekunder, studi dokumen akan menjadi teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alasan penulis memilih teknik tersebut dikarenakan kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data mengingat terbatasnya waktu yang disediakan. Beberapa dokumen yang

⁴⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial pengantar Prof. Dr. M. Budyatna, M.A* (Bandung: Unpar Press, 2006), hal 70.

⁴⁵ Sharan B. Merriam, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (San Fransisco: Jossey-Bass, 2009), hal 14-16.

⁴⁶ Ibid, hal 25.

digunakan oleh penulis adalah laporan tahunan dari *Economist Intelligence Unit* mengenai indeks demokrasi negara-negara di dunia dan perjanjian *Trade Investment Framework Agreement (TIFA)* antara AS dan Myanmar yang diambil dari Kantor Representatif Perdagangan AS.

1.7 Sistematika Pembahasan

Tulisan ini akan dibahas dengan sistematika penulisan bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan (latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data juga sistematika pembahasan).
- Bab II : Kebijakan *Pivot to Asia* AS (mendeskripsikan secara lebih mendetil apa itu kebijakan *Pivot to Asia*, tujuannya, strateginya, dan bagaimana hubungannya dengan negara-negara di Asia Pasifik).
- Bab III : Perkembangan demokrasi di Myanmar (menjelaskan perkembangan demokrasi pada masa rezim militer, rezim demokratis, timeline proses demokrasi di Myanmar beserta pengukuran indeks demokrasi di Myanmar pada tahun 2011-2016).
- Bab IV : Evaluasi hubungan ekonomi antara AS-Myanmar (merupakan bab inti yang akan menjelaskan bagaimana hubungan ekonomi AS-Myanmar setelah dan sebelum adanya *Pivot to Asia* serta menjelaskan bagaimana kontribusi kebijakan tersebut terhadap hubungan ekonomi antara AS dengan Myanmar).

- Bab V : Kesimpulan dan Saran (merupakan bagian akhir yang akan memuat kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil analisis yang sudah dilakukan penulis atas fenomena tersebut).